

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah perlunya pengelolaan otonomi daerah yang baik. Otonomi daerah haruslah berlandaskan pada acuan hukum dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Otonomi daerah sendiri merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Untuk membangun suatu wilayah tersebut pemerintah memerlukan perencanaan yang matang, strategi dan anggaran yang tepat.

Anggaran diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintah yang meliputi seluruh kegiatan pemerintah di dalam otonomi daerah. Untuk itu, diperlukan penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran yang baik, efektif dan efisien dapat

berguna bagi pemerintah dalam pelaksanaan otonomidaerah. Penyusunan anggaran dalam pemerintah sangat erat kaitannya dengan aktivitas pemerintah. Khususnya yang berhubungan dengan perencanaan (*planning*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*). Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja

Anggaran memiliki dua fungsi utama di dalam pemerintahan, yaitu sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Sebagai alat perencanaan, anggaran akan memberikan arah, pedoman dan standar bagi aktivitas yang dilakukan setiap bagian pemerintah. Sebagai alat pengendalian, anggaran akan berguna untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintahan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di awal periode. Dengan demikian, anggaran memiliki fungsi yang saling terkait dan terintegrasi satu dengan lainnya, serta memiliki fungsi ganda yang vital bagi pemerintah. Tanpa anggaran, pemerintah akan kehilangan arah, tolak ukur dan alat penilaian kinerja.

Salah satu anggaran yang terdapat dalam pemerintahan adalah anggaran kas. Untuk menyusun anggaran kas, pemerintah daerah perlu memiliki instrument pendukung berupa anggaran kas. Anggaran kas tersebut penting untuk membantu kelancaran pelaksanaan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah, serta anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Pemasukan pendapatan daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan tidak terjadi sama besarnya tiap bulan atau triwulannya, sehingga perlu diadakan sarana pengatur yaitu anggaran kas. Anggaran kas bertujuan untuk mengharmonisasikan

pemasukan dan pendapatan daerah di satu pihak dan kebutuhan-kebutuhan dana untuk belanja serta pembiayaan di pihak lain.

Anggaran kas pada dasarnya meliputi dua bagian, yaitu anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan serta anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan memuat perkiraan realisasi pendapatan yang diharapkan diterima untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan memuat perkiraan kebutuhan dana untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulan dan triwulan selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Untuk mencapai hal tersebut, BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun anggaran kas dengan baik, agar kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Analisis Penyusunan Anggaran Kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyusunan anggaran kas per bulan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis penyusunan anggaran kas per bulan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama dalam penyusunan anggaran kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Penulis dapat mengetahui dan mempelajari konsep penyusunan anggaran kas per bulan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - c. Mengetahui relevansi antara teori di perkuliahan dengan tempat di instansi.

## 2. Bagi Instansi

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat terutama dalam penyusunan anggaran kas per bulan.
- b. Dapat memberikan informasi yang digunakan oleh Badan Pembangunan Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan anggaran kas per bulan.

## 3. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai kajian pustaka dan bahan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan analisis penyusunan anggaran kas per bulan dalam pemeritahan.

### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Pada kuliah magang ini penulis memilih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (BAPPEDA) kota Padang sebagai tempat magang selama 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai dari tanggal 06 Januari 2020 s/d 28 Februari 2020.

### **1.6 Sistematika Penulisan Laporan**

**BAB I** : Pendahuluan

Mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang serta sistematika penulisan laporan.

## **BAB II : Landasan Teori**

Meliputi landasan teori yang menerangkan tentang analisis penyusunan anggaran kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB III : Gambaran Umum Perusahaan**

Membahas tentang gambaran umum perusahaan, sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta uraian tugas masing-masing.

## **BAB IV : Pembahasan**

Membahas tentang hasil kegiatan magang yang berisi tentang pembahasan mengenai analisis penyusunan anggaran kas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **BAB V : Penutup**

Merupakan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan demi kelangsungan aktivitas perusahaan.